

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan bentuk organisasi yang dibentuk oleh negara untuk melayani segala keperluan dan kepentingan masyarakat serta aturan-aturan yang dilaksanakan dapat memberi dampak positif dan berguna bagi suatu negara tersebut. Menurut Ningtias, dkk (2019) kegiatan pelayanan pemerintahan daerah terhadap masyarakat sering menjadi sorotan publik, karena seiring kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan dari instansi pemerintah tersebut yang dinilai kurang maksimal seperti dalam persoalan pembelanjaan anggaran sering terjadi pemborosan dana, penyelewengan dana, dan penyelenggaraan administrasi publik yang kurang efisien dan transparan sehingga hal tersebut menimbulkan gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan daerah

dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Nainggolan, 2018). Tidak semua kepala daerah dapat memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan sementara informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Untuk mempermudah dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut dapat dibantu menggunakan analisis laporan keuangan (Khairudin dan Aminah, 2017). Ketidaksesuaian realisasi APBD dengan yang direncanakan ini dapat terjadi karena banyak hal, misalnya: tidak sesuai realisasi indikator ekonomi daerah yang digunakan dengan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD. Dalam kondisi penyimpangan antara realisasi indikator dan asumsi dasar ini tidak terlalu jauh, APBD masih relatif mampu menyesuaikan pendapatan dan belanjanya dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Panjaitan, 2020).

Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah dimana penerimaannya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kumagaya dan Maysita, 2018). Anggaran seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin dapat diperoleh. Hal ini dilakukan agar realisasi anggaran pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, serta anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi yang dapat dicapai (Habiburrahman, 2016).

Pemerintah kota Bandar Lampung seharusnya mengubah komposisi belanja, dimana selama ini belanja daerah digunakan untuk belanja operasi yang kurang produktif daripada belanja modal (Rosiana, 2017). Menurut Romadoni (2017) pelaksanaan APBD kota Bandar

Lampung masih melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan jumlah pendapatan di daerahnya untuk memenuhi pengeluaran operasional dan untuk menggerakkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Belanja daerah kota Bandar Lampung masih harus disesuaikan lagi dengan skala prioritas pembangunan bukan hanya berfokus padabelanja pegawai tetapi seperti pembangunan saran dan prasarana untuk publik.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5(lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	469.870.000.000	324.670.000.000	69,10
2017	551.870.000.000	373.760.000.000	67,73
2018	541.870.000.000	398.450.000.000	73,53
2019	606.870.000.000	480.420.000.000	79,16
2020	801.070.000.000	410.460.000.000	51,24

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5(lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	85.690.000.000	49.650.000.000	57,94
2017	85.690.000.000	28.260.000.000	32,97
2018	58.080.000.000	29.580.000.000	50,93
2019	45.930.000.000	29.630.000.000	64,51
2020	83.930.000.000	25.730.000.000	30,65

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	10.940.000.000	10.890.000.000	99,53
2017	12.940.000.000	13.460.000.000	104,05
2018	15.440.000.000	14.890.000.000	96,48
2019	22.940.000.000	17.470.000.000	76,16
2020	40.500.000.000	21.280.000.000	52,53

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	122.780.000.000	98.170.000.000	79,96
2017	128.780.000.000	197.330.000.000	153,23
2018	172.990.000.000	107.350.000.000	62,06
2019	157.700.000.000	99.780.000.000	63,27
2020	205.210.000.000	80.090.000.000	39,03

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data diatas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan mengitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan

hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Pilat dan Morasa, 2017).

Berdasarkan fenomena dan penjelasan yang dipaparkan sebelumnya peneliti tertarik untuk menganalisis rasio anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya pada Kota Bandar Lampung dengan judul “**Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2020**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil analisis Rasio Kemandirian berdasarkan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2020?
2. Bagaimana hasil analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berdasarkan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2020?
3. Bagaimana hasil analisis Rasio Efektivitas berdasarkan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2020?
4. Bagaimana hasil analisis Rasio Efisiensi berdasarkan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2020?
5. Bagaimana hasil analisis Rasio Keserasian Belanja berdasarkan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2020?
6. Bagaimanakah hasil analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung diukur melalui *Share and Growth* APBD Kota Bandar Lampung selama Tahun Anggaran 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Rasio Kemandirian berdasarkan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2020.
2. Untuk menganalisis Rasio Derajat Desentralisasi berdasarkan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2020.
3. Untuk menganalisis Rasio Efektivitas berdasarkan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2020.
4. Untuk menganalisis Rasio Efisiensi berdasarkan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2020.
5. Untuk menganalisis Rasio Keserasian Belanja berdasarkan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016-2020.
6. Untuk menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung diukur melalui *Share and Growth* APBD Kota Bandar Lampung selama tahun anggaran 2016-2020.